LAPORAN TAHUNAN 2019



Layanan Informasi Publik

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH



Kata Pengantar

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat, karunia dan bimbingan-Nya dalam penyusunan Laporan Tahunan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2019.

Laporan tahunan ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan Peningkatan Pelayanan Data dan Informasi Publik bagi PPID Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2019. Beberapa inovasi dilakukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan informasi kepada masyarakat, diantaranya pembuatan aplikasi PPID berbasis Android yang sudah dapat diunduh dengan mudah di play store, dan informasi pada portal Open Data Jawa Tengah yang berbasis *website*. Dengan demikian masyarakat dapat dengan mudah mendapatkan pelayanan informasi publik dimana saja dan kapan saja.

Akhirnya penyusun menyadari sepenuhnya bahwa laporan ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu penyusun memohon kritik dan saran demi perbaikan laporan berikutnya. Semoga laporan ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca dan semua pihak yang terlibat dalam penyusunan Laporan Tahunan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2019.

Penyusun

DAFTAR ISI

Kata Pengantar		1
Daftar Isi		2
BAB I	Gambaran Umum Kebijakan Informasi Publik	3
BAB II	Gambar Umum Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik Tahun 2019	8
BAB III	Rincian Pelaksanaan Informasi Publik Tahun 2019	14
BAB IV	Rincian penyelesaian Sengketa Informasi Publik Tahun 2019	25
BAB V	Kendala Eksternal dan Internal Dalam Pelaksanaan Layanan Informasi Publik Tahun 2019	30
BAB VI	Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut	32
Dokumentasi Kegiatan PPID		34

BAB I

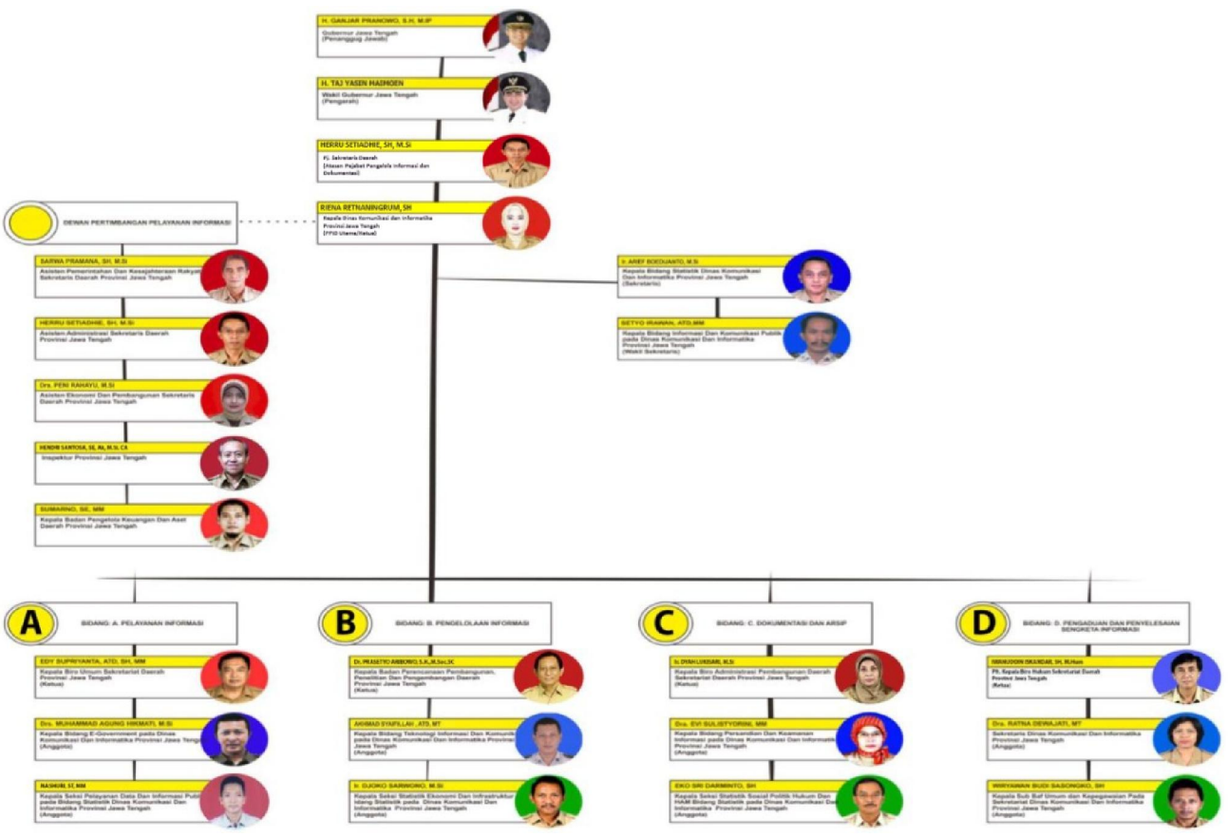
Gambaran Umum Kebijakan Pelayanan Informasi Publik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah

Gambaran Umum Kebijakan Pelayanan Informasi Publik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah

Keterbukaan Informasi Publik merupakan jaminan hukum bagi setiap orang untuk memperoleh informasi sebagai salah satu hak asasi manusia, sebagaimana diatur dalam UUD 1945 Pasal 28 F, yang menyebutkan, bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, dan menyimpan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.

Hak atas informasi menjadi sangat penting karena makin terbuka penyelenggaraan negara untuk diawasi publik, penyelenggaraan negara tersebut makin dapat dipertanggungjawabkan. Hak setiap Orang untuk memperoleh Informasi juga relevan untuk meningkatkan kualitas pelibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan publik. Keberadaan UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik sangat penting sebagai landasan hukum yang berkaitan dengan (1) Hak setiap Orang untuk memperolehInformasi; (2) Kewajiban Badan Publik menyediakan dan melayani permintaan Informasi secara cepat, tepat waktu, biaya ringan / proporsional.

Sebagai bentuk komitmen dan dukungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terhadap keterbukaan informasi publik dan wujud pernyataan kepatuhan kepada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Keterbukaan Informasi Publik (KIP), maka Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah dan selalu mengimplementasikan UU KIP tersebut di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Implementasi UU KIP tersebut diawali dengan keputusan Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 550/1/2013 Tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pada Badan Publik Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan kemudian dirubah menjadi Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 550/32 Tahun 2017 tentang Pembentukan Tim Pelaksana Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) yang menetapkan adanya Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu. Dimana Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama dijabat oleh Kepala Dinas Komunikasi Dan Informatika Provinsi Jawa Tengah.



Gambar 1.1
Struktur Organisasi PPID Utama Pemerintah
Provinsi Jawa Tengah

Perbaikan terus menerus diupayakan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah guna berpartisipasi mewujudkan terciptanya *open government* (pemerintahan yang terbuka) di Indonesia khususnya wilayah Jawa Tengah



Gambar 1.2 PPID Utama Prov. Jateng menerima Penghargaan Badan Publik Informatif Dalam Rangka Monev Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2019

Tahun 2019 Pemerintah Provinsi Jawa Tengah berpartisipasi dalam Monitoring dan Evaluasi (Monev) Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2019 yang diselenggarakan oleh Komisi Informasi Pusat. Pada penilaian tersebut PPID Pemerintah Provinsi Jawa Tengah berhasil meraih penghargaan sebagai Badan Publik Informatif Dalam Implementasi Undang - Undang Nomor 14 Tentang Keterbukaan Informasi Publik dengan total nilai 97.

Tahun 2019 PPID Pemerintah Provinsi Jawa Tengah berpartisipasi dalam Monitoring dan Evaluasi (Monev) Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2019 yang diselenggarakan oleh Komisi Informasi Pusat, pada penilaian tersebut, PPID Pemerintah Provinsi Jawa Tengah berhasil meraih penghargaan sebagai Badan Publik Informatif Dalam Implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Dengan Total Nilai 97, dan penghargaan ini merupakan penghargaan ke-dua kali berturut-turut.

Selanjutnya, dalam memudahkan dan mempercepat pemberian layanan informasi, PPID Pembantu melakukan pengklasifikasian dan pendokumentasian informasi publik, PPID Utama mengkoordinasikan pengumpulan dan pendataan informasi dari seluruh PPID Pembantu. Untuk selanjutnya, bagi informasi yang bersifat terbuka, dilakukan pengkategorian informasi menjadi informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala, informasi yang wajib tersedia setiap saat dan informasi serta merta.

Sementara itu, terhadap informasi yang dikecualikan, dilakukan uji konsekuensi oleh PPID Utama bersama unit terkait, selanjutnya daftar informasi yang dikecualikan tersebut ditetapkan oleh PPID Utama dan disetujui oleh Atasan PPID Utama.

Dengan ditetapkannya SOP terkait layanan informasi PPID dan daftar informasi publik diharapkan agar pelayanan kepada publik dapat berjalan dengan sebaik-baiknya yang pada akhirnya turut mendukung transparansi jalannya pemerintahan serta perwujudan *good governance* di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

BAB II

Gambaran Umum Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik Tahun 2019

Gambaran Umum Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik Tahun 2019

A. Sarana dan Prasarana Pelayanan Informasi Publik

Setiap permohonan informasi yang diajukan di Lingkungan PPID Utama akan dilayani sesuai dengan prosedur layanan informasi PPID. Apabila ada permohonan informasi yang bisa dipenuhi tanpa membutuhkan penjelasan lebih lanjut, dapat langsung dilayani di Ruang PPID. Namun untuk permohonan informasi yang diajukan membutuhkan penjelasan lebih, mendalam atau detail akan diarahkan kepada PPID Pembantu SKPD dan BUMD yang ada di Jawa Tengah.

Guna memperlancar pelayanan informasi publik, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah memiliki berbagai macam kanal informasi, baik melalui telepon, surat elektronik (email), faksimili, website http://jatengprov.go.id dan http://ppid.jatengprov.go.id , media sosial seperti Twitter, serta aplikasi *android* Jateng Slim serta kanal Open Data.

Strategi yang dilakukan untuk mengumpulkan bahan informasi publik adalah : (1) Mengirim surat permintaan dokumen informasi publik yang diperlukan oleh PPID Utama kepada unit kerja yang menguasai informasi publik; (2) Menugaskan staf untuk meminta/mendatangi langsung kepada sumber-sumber penghasil informasi. Informasi yang dikuasai dan dikelola PPID adalah dalam bentuk hardcopy dan softcopy yang sudah mendapat legitimasi pimpinan.

Bagi pemohon yang ingin menyampaikan secara langsung permohonan informasinya dapat mendatangi ruang PPID atau Helpdesk yang berada di lantai 1 Gedung Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah, Jalan Menteri Supeno I/2, Semarang.

Operasional layanan informasi yang dilaksanakan di ruang PPID dimulai pada pukul 07.00 wib s.d. 15.30 wib. Namun, di luar jam kerja tersebut masih dimungkinkan bagi pemohon informasi untuk menggunakan haknya dan itu biasanya dilakukan dengan menggunakan berbagai sarana media komunikasi yang ada tanpa harus datang langsung ke kantor Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah, seperti email, permintaan online melalui website, aplikasi PPID berbasis android dan media sosial seperti Twitter.

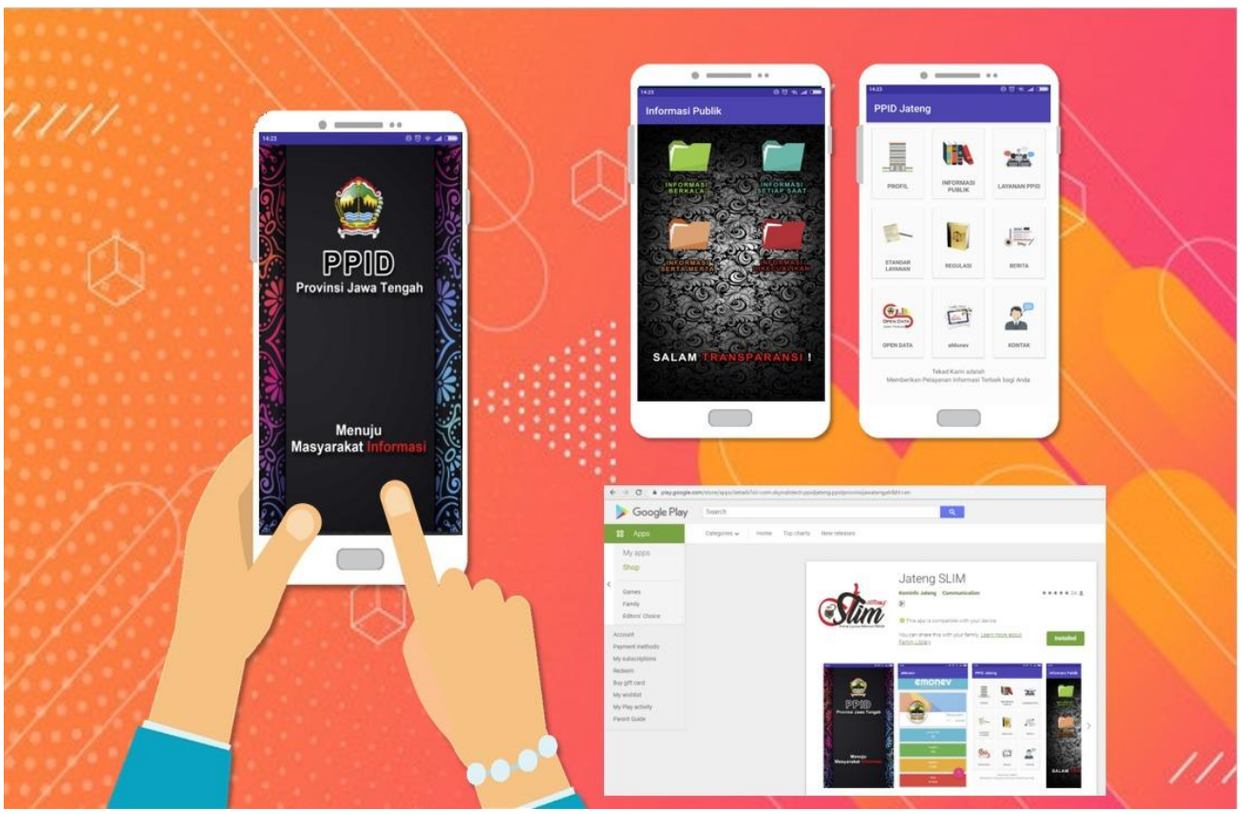
Selain memberikan layanan informasi atas dasar permintaan, PPID Provinsi Jawa Tengah juga secara proaktif memberikan layanan informasi (mengumumkan informasi secara berkala). Situs resmi PPID Provinsi Jawa Tengah (http://ppid.jatengprov.go.id/) menjadi sarana utama dalam penyampaian informasi publik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang termasuk dalam kategori informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala sesuai Pasal 9 UU KIP.

Inovasi dalam pelayanan informasi untuk publik terus kami lakukan, seiring dengan kemudahan dalam mengakses suatu informasi di era sekarang ini. Salah satunya adalah diluncurkannya portal Open Data Jawa Tengah di alamat http://data.jatengprov.go.id/, dimana masing-masing SKPD berperan langsung dalam keterisian data dan informasi sesuai tugasnya.

Dalam situs website PPID Provinsi Jawa Tengah, masyarakat dapat langsung melihat transparansi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, antara lain terkait konten transparansi kinerja dan anggaran, profil Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, agenda kegiatan, rencana umum pengadaan dan informasi penting lainnya berkaitan tugas dan fungsi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Pelayanan informasi publik tak hanya dilakukan di Kantor Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah saja namun pelayanan publik lainnya dilakukan di PPID Pembantu SKPD dan BUMD.

PPID Utama Provinsi Jawa Tengah mengembangkan aplikasi PPID berbasis android dan pengenalan aplikasi tersebut diluncurkan pada pada pembukaan Pesta Rakyat yang digelar di Kabupaten Pemalang dalam rangka memperingati Hari Jadi Provinsi Jawa Tengah ke-68, hari Sabtu, 18 Agustus 2018, dan pada tahun 2019 aplikasi yang dapat diunduh melalui Google Playstore ini tetap eksis mendapatkan respon yang baik dari para tim juri penilai saat Monitoring dan Evaluasi (Monev) Keterbukaan Informasi Publik yang diselenggarakan oleh Komisi Informasi Pusat.

Gambar 2.1 Aplikasi Android Jateng Slim Sudah Tersedia Di Google Play Store



B. Sumber Daya Manusia

Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik pada PPID Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, mulai dari pengumpulan bahan, penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan atau pelayanan Informasi Publik serta sengketa informasi, dalam pelaksanaannya PPID Utama dibantu oleh PPID Pembantu.

Pelayanan informasi publik di PPID Pemerintah Provinsi Jawa Tengah merujuk pada SK Gubernur Jawa Tengah Nomor 550/1/2013 Tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pada Badan Publik Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, dikelola Bidang Pelayanan Informasi, dan dibantu Staf Bidang Pengelolaan Informasi dalam pelaksanaan tugas sehari-hari yaitu menghimpun informasi publik yang wajib disediakan dan juga pelayanan kepada pemohon informasi publik.

Dalam rangka peningkatan kualitas sumber daya manusia petugas PPID, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah selalu mengadakan sosialisasi, bintek, forum Peningkatan Pelayanan Data dan Informasi Publik bagi PPID Pembantu SKPD dan BUMD Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, serta PPID Utama Kabupaten/Kota Se Jawa Tengah.

C. Anggaran

Seluruh pembiayaan dalam pelaksanaan yang terkait dengan PPID di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun Anggaran 2019, untuk kegiatan yang meliputi : Sosialisasi pengelolaan informasi publik, Bimbingan Teknis PPID, dan Uji Konsekuensi.

Gambar 2.2 Inforgrafis Dukungan Anggaran PPID Pada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah



BAB III

Rincian Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik Tahun 2019

Rincian Pelayanan Informasi Publik Tahun 2019

A. Kegiatan yang dilaksanakan

Dalam rangka meningkatkan pengetahuan dan pemahaman tentang Keterbukaan Informasi Publik, telah dilaksanakan beberapa kali Pelaksanaan Kegiatan pada Tahun 2019 meliputi :

1. Rapat Pembahasan Optimalisasi Badan Publik Sektor BUMD Provinsi Jawa Tengah pada tanggal 23 Januari 2019 bertempat di Ruang Rapat Lt. 1 Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah dihadiri oleh 30 peserta dari PPID Pembantu BUMD Provinsi Jawa Tengah;
2. Sosialisasi Peningkatan Pelayanan Data dan Informasi Publik bagi PPID dengan tema "Mewujudkan Tata Kelola PPID yang Informatif" pada tanggal 22 April 2019 bertempat di Hotel Grand Wahid Salatiga dengan peserta 102 orang terdiri dari : PPID Pembantu OPD Provinsi Jawa Tengah, PPID Pembantu BUMD Provinsi Jawa Tengah, dan PPID Utama Kab/Kota se Jawa Tengah;
3. Rapat Uji Konsekuensi pada tanggal 24 Juni 2019, bertempat di Aula Lt. IV Diskominfo Prov. Jateng dengan peserta Jumlah peserta rapat sebanyak 100 orang yang terdiri dari perwakilan PPID Pembantu 41 SKPD, 12 BUMD dan Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah serta unsur-unsur PPID Utama;
4. Bimbingan Teknis Peningkatan Pelayanan Data dan Informasi Publik bagi PPID dengan tema "Penyusunan Daftar Informasi Publik yang Berkualitas" di Jawa Tengah pada tanggal 27 Nopember 2019 di Hotel @HOM Semarang dengan peserta sebanyak 95 orang terdiri dari PPID Utama Kab/Kota se Jawa Tengah.

B. Jumlah Pemohon Informasi Publik

Selama Tahun 2019, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah beserta PPID Pembantu SKPD maupun BUMD telah menerima 21.682 (dua puluh satu ribu enam ratus delapan puluh dua) laporan permohonan informasi dengan waktu rata-rata pelayanan 5 hari kerja. Terdapat 93 (sembilan puluh tiga) permohonan yang diarahkan kepada Badan Publik lain, karena data / informasi tersebut belum dikuasai.

Pemohon informasi terdiri dari Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), mahasiswa, akademisi, pelaku usaha dan masyarakat umum. Tujuan penggunaan informasi sebagian besar untuk tugas kuliah, penelitian, pengawasan badan publik, perluasan cakupan pasar (penawaran produk/kerjasama), informasi pelayanan publik di SKPD dan BUMD.

Tabel 3

REKAPITULASI JUMLAH PEMOHON INFORMASI PPID UTAMA TAHUN 2019

NO	Bulan Register Permohonan Informasi	Jumlah Permohonan Informasi	Waktu yang diperlukan Menjawab Permohonan (hari)	Permohonan Informasi Publik Yang Dikabulkan	Permohonan Informasi Publik Yang Ditolak	Permohonan Keberatan	Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi			Keterangan
							KI	PTUN	MA	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*			*9*
1	JANUARI	20	5	20	0	0	0	0	0	TERPENUHI
2	FEBRUARI	18	4	18	0	0	0	0	0	TERPENUHI
3	MARET	28	4	28	0	0	0	0	0	TERPENUHI
4	APRIL	23	5	23	0	2	0	0	0	TERPENUHI
5	MEI	12	4	11	2	1	0	0	0	Tidak dipenuhi karena tidak dikuasai
6	JUNI	18	3	14	4	0	0	0	0	Tidak dipenuhi karena tidak dikuasai
7	JULI	40	5	21	19	0	1	0	0	Tidak dipenuhi karena tidak dikuasai
8	AGUSTUS	28	4	16	12	0	0	0	0	Tidak dipenuhi karena tidak dikuasai
9	SEPTEMBER	20	3	8	12	0	0	0	0	Tidak dipenuhi karena tidak dikuasai
10	OKTOBER	24	5	13	11	0	0	0	0	Tidak dipenuhi karena tidak dikuasai
11	NOPEMBER	34	6	25	9	1	0	0	0	Tidak dipenuhi karena tidak dikuasai
12	DESEMBER	47	7	26	21	0	0	0	0	Tidak dipenuhi karena tidak dikuasai
JUMLAH		312	55	223	90	4	1	0	0	
RATA-RATA		26	5	19	8	0	0	0	0	

TABEL 4
REKAPITULASI JUMLAH PEMOHON INFORMASI PPID PEMBANTU SKPD
TAHUN 2019

NO	SKPD	Jumlah Permohonan Informasi	Waktu yang diperlukan Menjawab Permohonan (hari)	Permohonan Informasi Publik Yang Dikabulkan	Permohonan Informasi Publik Yang Ditolak	Permohonan Keberatan	Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi			Ket.
							KI	PTUN	MA	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*			*9*
1	Sekretariat Daerah Provisi Jawa Tengah	13	1	13	0	0	0	0	0	TERPENUHI
2	Sekretariat DPRD Prov Jateng	1	1	1	0	0	0	0	0	TERPENUHI
3	Inspektorat Provinsi Jawa Tengah	1	1	0	1	0	0	0	0	TIDAK DIPENUHI KARENA TIDAK DIKUASAI
4	Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Provinsi Jawa Tengah	22	5	22	0	0	0	0	0	TERPENUHI
5	Badan Kepegawaian Provinsi Jawa Tengah	1	4	0	1	0	0	0	0	TIDAK DIPENUHI KARENA PERSYARATAN KURANG LENGKAP
6	Badan Pengelola Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah	57	3	56	1	0	0	0	0	TIDAK DIPENUHI KARENA TIDAK DIKUASAI
7	Kepala Badan Kesatuan Bangsa, dan Politik Provinsi Jawa Tengah	3	17	3	0	2	0	0	0	TERPENUHI

NO	SKPD	Jumlah Permohonan Informasi	Waktu yang diperlukan Menjawab Permohonan (hari)	Permohonan Informasi Publik Yang Dikabulkan	Permohonan Informasi Publik Yang Ditolak	Permohonan Keberatan	Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi			Ket.
							KI	PTUN	MA	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*			*9*
8	**Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah**	**12**	**10**	**12**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**TERPENUHI**
9	**Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Jawa Tengah**	**829**	**5**	**829**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**TERPENUHI**
10	**Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Tengah**	**35**	**3**	**35**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**TERPENUHI**
11	**Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah**	**261**	**10**	**259**	**2**	**1**	**1**	**0**	**0**	**BELUM DIKUASAI**
12	**Dinas Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah**	**78**	**7**	**74**	**4**	**0**	**0**	**0**	**0**	**TIDAK DIPENUHI KARENA TIDAK DIKUASAI**
13	**Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah**	**70**	**7**	**69**	**1**	**0**	**0**	**0**	**0**	**TIDAK DIPENUHI KARENA TIDAK DIKUASAI**
14	**Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah**	**1712**	**7**	**1692**	**20**	**0**	**0**	**0**	**0**	**TIDAK DIPENUHI KARENA TIDAK DIKUASAI**
15	**Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah**	**54**	**7**	**52**	**2**	**0**	**0**	**0**	**0**	**TIDAK DIPENUHI KARENA TIDAK DIKUASAI**

NO	SKPD	Jumlah Permohonan Informasi	Waktu yang diperlukan Menjawab Permohonan (hari)	Permohonan Informasi Publik Yang Dikabulkan	Permohonan Informasi Publik Yang Ditolak	Permohonan Keberatan	Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi			Ket.
							KI	PTUN	MA	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*			*9*
16	**Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah**	**2**	**1**	**2**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**TERPENUHI**
17	**Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah**	**45**	**5**	**45**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**TERPENUHI**
18	**Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah**	**177**	**10**	**175**	**2**	**0**	**0**	**0**	**0**	**TIDAK DIPENUHI KARENA TIDAK DIKUASAI**
19	**Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah**	**1725**	**10**	**1725**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**TERPENUHI**
20	**Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Jawa Tengah**	**17**	**10**	**17**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**TERPENUHI**
21	**Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah**	**655**	**14**	**624**	**31**	**0**	**0**	**0**	**0**	**TIDAK DIPENUHI KARENA TIDAK DIKUASAI**
22	**Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah**	**6**	**1**	**4**	**2**	**0**	**0**	**0**	**0**	**TIDAK DIPENUHI KARENA TIDAK DIKUASAI**
23	**Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Provinsi Jawa Tengah**	**209**	**6**	**199**	**10**	**0**	**0**	**0**	**0**	**TIDAK DIPENUHI KARENA TIDAK DIKUASAI**

NO	SKPD	Jumlah Permohonan Informasi	Waktu yang diperlukan Menjawab Permohonan (hari)	Permohonan Informasi Publik Yang Dikabulkan	Permohonan Informasi Publik Yang Ditolak	Permohonan Keberatan	Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi			Ket.
							KI	PTUN	MA	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*			*9*
24	**Dinas Pekerjaan Umum dan Sumber Daya Air Provinsi Jawa Tengah**	**78**	**10**	**78**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**TERPENUHI**
25	**Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Tengah**	**14**	**1**	**14**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**TERPENUHI**
26	**Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah**	**811**	**1**	**811**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**TERPENUHI**
27	**Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah**	**7**	**1**	**7**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**TERPENUHI**
28	**Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah**	**16**	**4**	**11**	**5**	**0**	**0**	**0**	**0**	**TIDAK DIPENUHI KARENA TIDAK DIKUASAI**
29	**Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah**	**6**	**7**	**6**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**TERPENUHI**
30	**Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah**	**12**	**10**	**12**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**TERPENUHI**
31	**Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Jawa Tengah**	**8**	**3**	**6**	**2**	**0**	**0**	**0**	**0**	**TIDAK DIPENUHI KARENA TIDAK DIKUASAI**

NO	SKPD	Jumlah Permohonan Informasi	Waktu yang diperlukan Menjawab Permohonan (hari)	Permohonan Informasi Publik Yang Dikabulkan	Permohonan Informasi Publik Yang Ditolak	Permohonan Keberatan	Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi			Ket.
							KI	PTUN	MA	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*			*9*
32	**Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Tengah**	**4**	**1**	**4**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**TERPENUHI**
33	**Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Tengah**	**130**	**5**	**122**	**8**	**0**	**0**	**0**	**0**	**TIDAK DIPENUHI KARENA TIDAK DIKUASAI**
34	**Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Moewardi Provinsi Jawa Tengah**	**610**	**5**	**610**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**TERPENUHI**
35	**Rumah Sakit Jiwa Daerah Dr. Amino Gondohutomo Provinsi Jawa Tengah**	**874**	**1**	**874**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**TERPENUHI**
36	**Rumah Sakit Jiwa Daerah Dr. RM Soedjarwadi Provinsi Jawa Tengah**	**31**	**1**	**31**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**TERPENUHI**
37	**Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta Provinsi Jawa Tengah**	**100**	**2**	**100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**TERPENUHI**
38	**Rumah Sakit Umum Daerah Kelet Provinsi Jawa Tengah**	**8**	**1**	**8**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**TERPENUHI**
39	**Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. Margono Soekardjo Provinsi Jawa Tengah**	**1683**	**3**	**1683**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**TERPENUHI**

NO	SKPD	Jumlah Permohonan Informasi	Waktu yang diperlukan Menjawab Permohonan (hari)	Permohonan Informasi Publik Yang Dikabulkan	Permohonan Informasi Publik Yang Ditolak	Permohonan Keberatan	Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi			Ket.
							KI	PTUN	MA	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*			*9*
40	**Rumah Sakit Umum Daerah Tugurejo Provinsi Jawa Tengah**	**1**	**6**	**1**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**TERPENUHI**
41	**Badan Penghubung Provins Jawa Tengah**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**TERPENUHI**
JUMLAH		**10378**	**207**	**10286**	**92**	**3**	**1**	**0**	**0**	
RATA-RATA		**253**	**5**	**251**	**2**	**0**	**0**	**0**	**0**	

TABEL 4
REKAPITULASI JUMLAH PEMOHON INFORMASI PPID PEMBANTU BUMD
TAHUN 2019

NO	BUMD	Jumlah Permohonan Informasi	Waktu yang diperlukan Menjawab Permohonan (hari)	Permohonan Informasi Publik Yang Dikabulkan	Permohonan Informasi Publik Yang Ditolak	Permohonan Keberatan	Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi			Ket.
							KI	PTUN	MA	
a	*b*	*c*	*d*	*e*	*f*	*g*	*h*			*i*
1	PT. Sarana Pembangunan Jateng	0	0	0	0	0	0	0	0	TERPENUHI
2	PT.JAMKRIDA	0	0	0	0	0	0	0	0	TERPENUHI
3	PT. Bank Jateng	11245	1	11245	0	0	0	0	0	TERPENUHI
4	PT. Sarana Patra Hulu Cepu	0	0	0	0	0	0	0	0	TERPENUHI
5	PT. Asuransi Bangun Askrida	0	0	0	0	0	0	0	0	-
6	PT. Bank Perkreditan Rakyat BPR BKK	0	0	0	0	0	0	0	0	-
7	PT. Trans Marga Jateng	0	0	0	0	0	0	0	0	-
8	PT. Kawasan Industri Wijaya Kusuma	1	1	1	0	0	0	0	0	TERPENUHI
9	PT. PRPP Jateng	38	7	38	0	0	0	0	0	TERPENUHI
10	PT. Sarana Patra Jateng	12	1	12	0	0	0	0	0	TERPENUHI
11	PD. Air Bersih Jateng	1	1	0	1	0	0	0	0	TIDAK DIPENUHI KARENA TIDAK DIKUASAI
12	PD. Citra Mandiri Jateng	7	10	7	0	0	0	0	0	TERPENUHI
JUMLAH		11304	21	11303	1	0	0	0	0	
RATA-RATA		942	2	942	0	0	0	0	0	

Sumber Data : PPID Pembantu SKPD dan BUMD Prov. Jateng 2019

C. Waktu Pelayanan Permintaan Informasi Publik

PPID Utama Provinsi Jawa Tengah dalam melakukan pelayanan informasi publik membutuhkan waktu rata-rata 5 hari kerja dalam melakukan pelayanan.

D. Jumlah Pemohon Informasi Publik Yang Dikabulkan

Pada Tahun 2019, PPID Utama Provinsi Jawa Tengah mengabulkan 21.589 (dua puluh satu ribu lima ratus delapan puluh sembilan) pemohon informasi atau 99,5% dari 21.682 (dua puluh satu ribu enam ratus delapan puluh dua) permintaan informasi publik yang telah diterima PPID Pembantu SKPD dan BUMD Provinsi Jawa Tengah, sedangkan permohonan informasi yang diterima melalui PPID Utama Provinsi Jawa Tengah sebanyak 223 (dua ratus dua puluh tiga) pemohon informasi yang telah dikabulkan.

E. Jumlah Pemohon Informasi Publik Yang Diarahkan dan Ditolak

Pada Tahun 2019, terdapat 93 permintaan informasi publik (0,4%) yang diarahkan atau ditolak karena data/informasi yang diminta pemohon merupakan informasi yang belum dikuasai.

BAB IV

Rincian Penyelesaian Sengketa Informasi Publik Tahun 2019

Rincian Penyelesaian Sengketa Informasi Publik Tahun 2019

A. Jumlah Keberatan Yang Diterima

Sepanjang Tahun 2019, PPID Utama Provinsi Jawa Tengah mendapat 4 (empat) keberatan informasi yang diterima, yakni Sdr. Sarif Hidayat; Pattiro Semarang (2); dan Sdr. Jusri Sihombing.

Tabel 5
REKAPITULASI JUMLAH KEBERATAN INFORMASI TAHUN 2012-2019

NO	TAHUN	JUMLAH KEBERATAN INFORMASI	KETERANGAN
1	2012		Permohonan Informasi telah diteruskan ke SKPD dan Dijawab Langsung oleh SKPD terkait
2	2013		
3	2014	1 (dari Mata Umat)	
4	2015		
5	2016	1 (dari PKN)	
6	2017		
7	2018	2 (dari Independent, SH, MH & Partners Advokat Konsultan Hukum; LBH Semarang)	
8	2019	4 (dari Sdr. Sarif Hidayat; Pattiro Semarang 2; Sdr. Jusri Sihombing)	
JUMLAH		**8**	

B. Tanggapan Atas Keberatan

Sepanjang Tahun 2019 PPID Utama Provinsi Jawa Tengah telah memberikan 4 (empat) tanggapan atas keberatan informasi yaitu :

1. Tanggapan Keberatan dari Sdr. Sarif Hidayat atas dokumen pelaksanaan Kegiatan Apel Kebangsaan meliputi Dokumen Latar Belakang, Pemenang Tender dan Laporan Pertanggungjawaban Kegiatan. Informasi yang dimohonkan dipenuhi sebagian, karena Laporan Pertanggungjawaban Kegiatan sedang dalam proses pendokumentasian oleh PPID Pembantu Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah;

2. Tanggapan Keberatan dari PATTIRO Semarang atas Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA-SKPD) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 dan Dokumen Kontrak Kerja Kegiatan Apel Kebangsaan Tahun 2019 serta Laporan Pertanggungjawaban Kegiatan. Informasi yang dimohonkan dipenuhi sebagian karena Laporan Pertanggungjawaban Kegiatan sedang dalam proses pendokumentasian oleh PPID Pembantu Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah;

3. Tanggapan Keberatan dari Sdr. Jusri Sihombing atas Salinan/ Fotokopi Surat Pertanggungjawaban (SPJ) penggunaan dana BOS dan lampiran-lampirannya dari SMA Negeri 1 Balapulang, SMA Negeri 1 Bojong, SMA Negeri 1 Dukuhwaru, SMA Negeri 1 Kramat, SMA Negeri 1 Pangkah, SMA Negeri 1 Slawi, SMA Negeri 2 Slawi, SMA Negeri 3 Slawi, SMA Negeri 1 Pagerbarang, SMA Negeri 1 Margasari dan SMA Negeri 1 Warureja Kabupaten Tegal. Informasi tersebut dipenuhi melalui PPID Pembantu Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah, tetapi tidak direspon baik oleh PPID Pembantu sehingga pemohon melakukan sengketa informasi;

4. Tanggapan Keberatan dari PATTIRO Semarang atas dokumen Kontrak Pekerjaan Penyediaan Konsumsi Pengelolaan SMK Boarding di Semarang, Pati dan Purbalingga Periode Januari sampai dengan Februari dan Maret sampai dengan Desember Tahun Anggaran 2019; Rincian Kegiatan dan Anggaran Kegiatan Pembinaan Kesiswaan SMK melalui pembinaan forum OSIS Jawa Tengah Tahun 2019; Rincian Kegiatan, Anggaran dan Laporan Kegiatan Pembinaan Kesiswaan SMK melalui melalui LKS SMK Tingkat Provinsi Tahun 2019; Rincian Kegiatan, Anggaran dan Laporan Kegiatan Pembiayaan Layanan Pendidikan SMK melalui pengelolaan SMK Boarding di Semarang, Pati dan Purbalingga Tahun 2019. Informasi yang dimohonkan dipenuhi sebagian karena laporan kegiatan sedang dalam proses pendokumentasian dan proses audit oleh Inspektorat Provinsi Jawa Tengah.

C. Jumlah Permohonan Penyelesaian Sengketa Ke Komisi Informasi

Sepanjang Tahun 2019, pada PPID Utama Provinsi Jawa Tengah terdapat hanya 1 (satu) permohonan penyelesaian sengketa informasi yaitu mengenai Surat Pertanggungjawaban (SPJ) penggunaan dana BOS pada 11 Sekolah Menengah Atas di Kabupaten Tegal ke Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah. Hasil mediasi dan/atau keputusan ajudikasi Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah diputuskan bahwa informasi dimaksud akan diberikan setelah proses audit selesai dengan biaya penggandaan dibebankan kepada pemohon informasi.

D. Jumlah Pemohon Informasi Publik Yang Diarahkan dan Ditolak

Selama Tahun 2019, PPID Utama Provinsi Jawa Tengah menolak dan mengarahkan 93 permohonan informasi publik karena bukan kewenangan dari PPID Utama Provinsi Jawa Tengah maupun PPID Pembantu SKPD dan BUMD Provinsi Jawa Tengah, namun merupakan kewenangan Pemerintah Pusat, BUMN, maupun Pemerintah Kabupaten/Kota.

BAB V

Kendala Eksternal dan Internal Dalam Pelaksanaan Layanan Informasi Publik Tahun 2019

Kendala Eksternal dan Internal Dalam Pelaksanaan Layanan Informasi Publik Tahun 2019

Beberapa kendala dalam pelaksanaan layanan informasi publik di PPID Utama Provinsi Jawa Tengah sebagai berikut :

1. Pemahaman terhadap Keterbukaan Informasi Publik belum secara merata diimplementasikan di seluruh PPID Pembantu SKPD dan BUMD Provinsi Jawa Tengah;
2. Pengelolaan database PPID belum sepenuhnya memanfaatkan teknologi informasi;
3. Pemanfaatan portal Open Data yang kurang maksimal, dan belum semua aplikasi milik SKPD dan BUMD Provinsi Jawa Tengah terintregasi dengan Open Data;
4. Peran PPID Pembantu SKPD dan BUMD Provinsi Jawa Tengah masih belum aktif dalam menyampaikan informasi terbaru di website ppid.jatengprov.go.id , serta aplikasi Jateng Slim dan media sosial;
5. Belum semua pengelola layanan informasi dan dokumentasi di lingkungan PPID Utama, PPID Pembantu SKPD dan BUMD Provinsi Jawa Tengah memiliki sertifikat ke-PPID-an dari Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia;
6. Respon PPID Pembantu SKPD dan BUMD Provinsi Jawa Tengah dalam menjawab setiap permohonan informasi publik kurang responsif dan cepat.

BAB VI

Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut

Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut

Rekomendasi dan rencana tindak lanjut untuk meningkatkan kualitas pelayanan informasi PPID adalah :

1. Menyampaikan informasi terkait keterbukaan informasi publik kepada pejabat dan staf PPID Pembantu SKPD dan BUMD Provinsi Jawa Tengah pada kegiatan sosialisasi, bintek, rapat, dan uji konsekuensi yang diselenggarakan PPID Utama;
2. Pengoptimalan database yang terpusat dan memanfaatkan portal Open Data dan *Single Data System* sebagai alternatif database data sektoral pada masing-masing PPID Pembantu SKPD dan BUMD Provinsi Jawa Tengah;
3. Mengajak PPID Pembantu SKPD dan BUMD Provinsi Jawa Tengah untuk selalu aktif dalam mengupdate informasi dan memberikan pelayanan yang maksimal ketika ada permohonan informasi;
4. Mengikutsertakan para pengelola layanan informasi dan dokumentasi di lingkungan PPID Utama, PPID Pembantu SKPD dan BUMD Provinsi Jawa Tengah pada sertifikasi ke-PPID-an yang diselenggarakan secara berkala oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia;
5. Meningkatkan peran dan komitmen implementasi Keterbukaan Informasi Publik pada SKPD dan BUMD di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

Demikian laporan tahunan secara ringkas ini disusun sebagai bahan evaluasi layanan informasi publik PPID Utama Provinsi Jawa Tengah.

Pj. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA TENGAH
Selaku
ATASAN PPID UTAMA

Ditandatangani secara elektronik oleh:

HERRU SETIADHIE, SH, M.Si

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE).

Dokumentasi Kegiatan

Kelembagaan PPID

DOKUMENTASI
RAPAT PEMBAHASAN OPTIMALISASI PPID BADAN PUBLIK SEKTOR BUMD
PROVINSI JAWA TENGAH

Dinas Kominfo Prov. Jateng, 23 Januari 2019







DOKUMENTASI
SOSIALISASI PENINGKATAN PELAYANAN DATA DAN INFORMASI PUBLIK
BAGI PPID

"Mewujudkan Tata Kelola PPID yang Informatif"
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah
Hotel Grand Wahid, 22 April 2019














SOSIALIASI
PENINGKATAN PELAYANAN DATA DAN
INFORMASI PUBLIK BAGI PPID
"Mewujudkan Tata Kelola PPID yang Informatif"


SOSIALIASI
NINGKATAN PELAYANAN DATA DAN
INFORMASI PUBLIK BAGI PPID


ANAN DATA DAN
IK BAGI PPID



DOKUMENTASI
UJI KONSEKUENSI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
TINGKAT PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
Semarang, 23 Juni 2019








BUKA
SEKUENSI
MODERATOR
PPID UTAMA


SKPD






BUKA
SEKUENSI
g dikecualikan
vinsi Jawa Tengah
MODERATOR
UTAMA

DOKUMENTASI
BIMBINGAN TEKNIS PENINGKATAN PELAYANAN DATA DAN INFORMASI PUBLIK BAGI PPID

"Penyusunan Daftar Informasi Publik yang Berkualitas"
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah
Hotel @HOM Semarang, 27 November 2019






BIMBINGAN TEKNIS
PENYUSUNAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK



DOKUMENTASI
UJI PUBLIK BADAN PUBLIK PROVINSI JAWA TENGAH
UNISULA SEMARANG, 19 November 2019






PENANDATANGANAN MEM
DALAM RANG
BADA

DOKUMENTASI
KIP AWARD
Hotel Patra Jasa Semarang, 19 Desember 2019








AWARD
2019
BERDAYA AIR DAN PENATA
LINDUNGAN ANA
SA BERENCANA


2019




KIP
AWARD
2019
SUMBER DAYA AIR DAN PENATAAN
PERLINDUNGAN ANAK
BERENCANA


KIP
AWARD
2019
SUMBER DAYA AIR DAN PENATAA
PERLINDUNGAN AN
BERENCANA


KOMISI INFORMASI
PROVINSI JAWA TENGAH
KIP
AWARD